

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Masyarakat dalam setiap lapisannya memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu bangsa atau suatu wilayah tertentu. Peran masyarakat tersebut bermain dalam ruang dan waktu yang tiada terbatas. Peran itu terkadang melampaui batas-batas wilayah, baik wilayah teritorial politik, ekonomi maupun kultural. Masyarakat dalam wilayah *civil soceity* memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendorong proses demokratisasi.¹

Politik juga menjadi bagian dari kehidupan sosial/muamalah dalam Islam yang terbukti dengan adanya sejarah tentang perpolitikan dikalangan umat Islam, yang dalam mempelajarinya dispesifikasikan kedalam Al-quran. Banyak pemikir-pemikir Islam yang berbicara dan mengeluarkan pemikiran tentang politik seperti Al- Mawardi, Al- Ghazali, Ibnu Ani Raba'I, Al- Haramain, Abdul Qayyum, dll, yang mana tokoh-tokoh tersebut berpendapat bahwa permusyawaratan harus ditegakkan, hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.(As-Syura ayat 38).

Dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan para Khulafa Al-Rasyidin, khususnya berawal setelah terbunuhnya Usman bin Affan maka muncul lah beberapa golongan yang menguatkan pendapat mereka masing-masing seperti Khawarij, Mu'tazilah dan Syi'ah, kelompok-kelompok ini muncul kepermukaan ketika akan berakhirnya era kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dimana pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawwiyah yang mana pada akhirnya dimenangkan oleh Muawwiyah melalui jalur tahkim.²

Jika di kaitkan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang, maka jelaslah bahwa tidak ada kesamaan dalam pemilihan seorang kepala negara atau pun kepala daerah, yang mana di Indonesia pada saat ini berlaku sistem pemilihan secara langsung. Dalam sistem ini semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat, berhak untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Sementara dalam sejarah Islam dan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para pemikir-pemikir Islam cara pemilihan kepala Negara/pemimpin dilakukan dengan perwakilan atau ahli al-ikhtiyar.

Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa

¹Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 156.

²Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 98-101

pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.³

Di Indonesia sendiri yang masyarakatnya mayoritas beragama islam, untuk memilih pemimpin umat islam di Indonesia maupun negara islam yang lainnya telah diwajibkan untuk memilih pemimpin yang sesama muslim karena sudah ada dalam beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang memilih seorang pemimpin. Hal ini seperti tuntunan Al-Quran Surah Al- Maidah ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتتَّخِذُوا لِيَهُوَ وَدَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang alim.

Pemilihan dengan melibatkan banyak atau seluruh masyarakat yang berhak memilih dalam menentukan pilihan adalah hal yang terbaik dan harus terjadi, namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput (golongan putih). Kalau hal ini terjadi atas kehendak sendiri atau karena memang itu yang menjadi pilihan, artinya masyarakat itu sudah mempunyai pilihan, tentunya mereka juga mempunyai alasan-alasan mengapa harus golput, namun yang celaka adalah calon pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena dia tidak tahu atau tidak menyadari kalau dia sudah bisa untuk menggunakan hak pilihnya, dan bisa juga karena adanya hambatan untuk memperoleh kartu pemilih. Hal ini besar kemungkinan akan terjadi pada calon pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti Pemilihan Umum.

Pemilihan umum sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Indonesia baik pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk dapat memberikan hak suara dalam Pemilu maka harus berusia 17 tahun seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 BAB IV pasal 19 ayat 1 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴

Dalam demokrasi Pancasila setiap masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikiran dalam bentuk apapun sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 19 Declaration Of Human Righ Perserikatan Bangsa-Bangsa, disana dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan pendapat-pendapat dengan tidak mendapatkan gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan tidak memandang batas-batas.

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

⁴Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilu Memilih 1955-2004*(Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h. 3.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung.⁵

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti halnya di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Di Desa Manunggal merupakan salah satu contoh proses pemilihan kepala desa dalam arena perpolitikan, pasalnya tiap calon berlomba-lomba mencari dukungan, khususnya bagi kalangan pemuda atau pemilih pemula.

Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk demokrasi yang terjadi dalam masyarakat desa. Kegiatan ini menarik, karena melibatkan banyak orang khususnya warga desa. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten dan juga di tingkat paling bawah yaitu desa selalu menarik untuk dibahas pemilihannya, baik sebelum pelaksanaan ataupun sesudah pelaksanaan. Kandidat yang maju dalam pemilihan kepala desa selalu mempunyai motivasi dan juga strategi untuk memenangkan pemilihan tersebut. Untuk memilih strategi yang tetap harus mempertimbangkan latar belakang kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat mengenai pemilihan serentak, baik itu pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, hingga yang terkecil pemilihan kepala desa. Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak di 304 Desa, 16 Kecamatan yang diikuti 1662 calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada Selasa 19 April 2016.⁶ Salah satunya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang .

Pembahasan mengenai partisipasi politik merupakan persoalan yang menarik untuk diperbincangkan karena melalui partisipasi politik kegiatan negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Respon masyarakat bisa bersifat kolektif, terorganisir ataupun spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁷

Partisipasi politik salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁸

Partipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat, baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh 'Herbert Miclosky' bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemuliharaan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁹

⁵<http://www.google.co.id/search?ie=ISO88591&q=partisipasi+pemilih+pemula+dalam+pemilihan+kepala+desa&btnG=nyliksik> di kutip pada tanggal 9 februari 2017 jam 12:41 wib

⁶<http://news.okezone.com/read/2016/04/19/340/1366566/hari-ini-pilkades-serentak-digelar-di-deliserdang> di kutip pada tanggal 9 februari 2017 jam 12:41 wib

⁷Samuel P. Huntington; Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 5.

⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), h. 140

⁹http://liskacahmilika.blogspot.co.id/2012/11/makalah-partisipasi-politik_15.html di kutip pada tanggal 9 februari 2017 jam 13.00 wib

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Sebab dengan berpartisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan masyarakat secara universal. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum.¹⁰

Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik. Pemilihan kepala daerah atau kepala desa sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanasifasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye.

Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah. Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena-fenomena ini selalu muncul dimana-mana lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik didalamnya ada kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan. Dalam pemilih pemula batasan usia sebagai pemilih mencakup dari umur 17- 24 tahun, itu dikarenakan umur 17 tahun belum tentu mempunyai KTP.

Dalam konteks tersebut, pemilih pemula perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan pemilihan kepala desa merupakan yang berguna. Dengan begitu mereka memosisikan sebagai warganegara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai pemilih. Dalam upaya itu, mereka membutuhkan pendidikan politik untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik.

Desa Manunggal merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Labuhan Deli. Desa Manunggal tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yang terletak di wilayah Labuhan Deli, dimana pemilih pemula di daerah ini sangat minim sekali mendapat pendidikan politik dari aktivis-aktivis partai politik maupun pemerintah, hal ini di tunjukkan dengan minimnya pengurus partai politik yang ada di tingkat desa dan juga pengetahuan tentang politik pemilih pemula di desa tersebut sangat minim. Dari minimnya pendidikan politik yang di peroleh oleh pemuda di tingkat desa, penulis mensinyalir bahwa pemilih pemula yang rendah pendidikan politik ini akan ikut mendominasi dalam peningkatan angka partisipasi politik di tingkat nasional.

¹⁰Keith Faulks, *Sosiologi Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 226

Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan serentak kepala desa tahun 2016 maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut, adapun penelitian akan dilaksanakan di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan apa yang telah penulis utarakan pada uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang”.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok masalah adalah partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang tahun 2016. Sedangkan yang menjadi rincian masalah meliputi :

1. Bagaimana perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa di desa manunggal?
2. Bagaimana pemilih pemula menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala desa di desa manunggal?
3. Bagaimana pemahaman pemilih pemula terhadap politik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pemahaman (partisipasi politik) pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perilaku pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemilih pemula menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala desa.
3. Untuk mengetahui pemahaman pemilih pemula terhadap politik ataupun sebagai partisipasi untuk pertama kali.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulis sendiri dan sebagai wujud dari apa yang telah di dapat di bangku perkuliahan, lain dari pada itu juga diharapkan berguna dimasa yang akan datang dan akan menjadi referensi untuk penulisan yang selanjutnya.
 - b. Data yang telah didapatkan dalam penelitian ini tentang partisipasi pemilih pemula maka KPUD bisa menyusun langkah untuk mempermudah mensosialisasikan ditingkat pemilih pemula.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara luas diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam mendorong partisipasi politik masyarakat desa yang lebih demokratis. Ketika pada saat ini berkembang fenomena yang menunjukan bahwa angka partisipasi dan kepercayaan masyarakat sangat minim terhadap proses perpolitikan ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah digunakan dalam judul penelitian di atas, maka penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah tersebut membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipasi politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dalam proses pemilihan penguasa dan pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik menurut Herbert Mc. Klosky adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung, maupun tidak langsung, dan dalam proses pembentukan kebijakan umum.
2. Pemilih pemula menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemilih yang tidak mempunyai suatu partai politik atau bagian dari partai politik (independen); pemilih mengayuh atau mengambang. Pemilih pemula ialah merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik di dalam adanya kegiatan politik, yaitu mereka yang memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya kedepan dapat berperan dalam bidang politik.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau alat yang telah ditentukan untuk memecahkan suatu masalah agar bentuk dari penelitian tidak melewati jalurnya. Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sesungguhnya dan jelas tujuannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Populasinya adalah remaja-remaja yang berusia 17/ remaja-remaja yang pertama mengikuti Pilkada. Dalam hal ini, peneliti ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Metode dan Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif. Yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini adalah pengetahuan pemilih pemula dalam hal partisipasi politik dalam hal pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu harus digunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang berupa deskriptif dari narasumber, remaja dan remaja. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.¹¹

3. Tempat dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun VII A, VIII, IX A Desa Manunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena penulis sendiri merupakan pemuda di daerah tersebut, sehingga mempermudah

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 292

dan memperlancar dalam melakukan penelitian. Objek penelitian ini adalah Remaja-Remaji yang merupakan pemilih pemula.

4. Teknik Menentukan Informan

Sebagaimana layaknya dalam penelitian kualitatif, informan awal dalam penelitian ini ditetapkan secara purposif, yaitu ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan tujuan peneliti dikaitkan dengan pemahaman informan terhadap permasalahan yang diteliti informan pertama diminta untuk mengikuti orang lain yang dapat membedakan informasi. Informannya adalah remaja-remaji Masjid di lingkungan tempat tinggal saya..

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama dengan berpegang pada pertanyaan pokok penelitian ini: Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Pertanyaan penelitian ini menjadi fokus dalam pengumpulan data lapangan. Sementara itu, hakikat peneliti sebagai instrument kunci diaplikasikan dalam penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Wawancara baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur terhadap para informan. Proses wawancara dilakukan dalam lima tahapan, yaitu:

- a. Menentukan aktor yang diwawancarai.
- b. Mempersiapkan kegiatan wawancara, sifat pertanyaan, alat bantu, menyesuaikan waktu dan tempat, membuat janji.
- c. Langkah awal, menentukan fokus permasalahan, membuat pertanyaan-pertanyaan pembuka (yang bersifat terbuka dan terstruktur), dan mempersiapkan catatan sementara.
- d. Pelaksanaan melakukan wawancara sesuai dengan persiapan yang dikerjakan.
- e. Menutup pertemuan.

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dalam situs penelitian, dimulai dengan rentang pengamatan yang bersifat umum atau luas, kemudian terfokus pada permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data secara umum dibagi menjadi tiga tingkat, yakni analisis pada tingkat awal, analisis pada pengumpulan data lapangan, dan analisis setelah selesai pengumpulan data. Esensi analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mereduksi data, karena dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan harus mendalam dan mencukupi sesuai fokus dan tujuan penelitian.

Untuk itu, data yang didapat kemudian dianalisis dengan penggunaan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.

1) Reduksi Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kata “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1984). Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, dan jaringan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangka analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsisi. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan final mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Tegasnya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan suatu jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang umum disebut analisis.¹²

Dalam proses ini, peneliti juga merumuskan latar belakang masalah, menegaskan fokus, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, sampai kepada penulisan acuan teoritis dan metodologi penelitian. Untuk itu, data awal sudah mulai dikumpulkan dari studi pendahuluan dengan berkunjung dan mengamati objek serta aktivitas yang berhubungan dengan fokus atau permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis selama pengumpulan data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data itu dimulai. Secara keseluruhan, proses analisis ini dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dimulai dengan proses penelusuran data dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi
- 2) Data atau informasi yang diperoleh diidentifikasi satuan analisisnya dan alternatif kategori itu yang mungkin untuk analisis itu
- 3) Satuan analisis atau alternatif kategori itu diuji keabsahannya melalui triangulasi, memperhatikan kemungkinan adanya kasus negatif dan kasus ekstrim.

Analisis data tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data hasil wawancara, hasil observasi, dan studi dokumentasi pada buku atau menggolongkan data/informasi yang diperoleh dalam satu fokus tertentu sesuai jumlah fokus penelitian.

¹²Salim dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), h. 148-150

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori yang mencakup didalamnya pembahasan mengenai : pengertian pemilih pemuladan batasan usia, perilaku pemilih, pengertian pemilihan umum, pengertian desa, perangkat-perangkat desa.

BAB III: Profi Desa mencakup Demografi, Sosial, Kebudayaan, Agama dan Ekonomi Serta Pendidikan.

BAB IV: Hasil Tinjauan terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Manunggal.

BAB V : Kesimpulan dan Saran